BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan isu yang dapat muncul baik dari negara maju maupun di negara berkembang. Perbedaan antara negara maju dan negara berkembang dapat dilihat dari kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yang ada. Menurut Bappenas dalam (A. Sari & Samsuddin, 2025) negara berkembang cenderung lebih sulit dalam menghadapi kemiskinan dibanding dengan negara maju, yang biasanya memiliki kesenjangan pendapatan yang lebih kecil.

Kemiskinan tetap menjadi tantangan yang terus-menerus dan beragam di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan dan perkotaan yang kurang berkembang (Wahyudi et al., 2025). Menurut Isroviyah, sebagai negara berkembang, kemiskinan merupakan salah satu isu besar di dalam perekonomian Indonesia, seolah-olah menjadi "pekerjaan rumah" yang belum dapat terselesaikan (Isroviyah, 2021). Usaha pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan sebenarnya sudah ditempuh dengan berbagai cara, mulai dari program bantuan sosial modal atau uang tunai kepada rakyat miskin sampai program transmigrasi. Masalah kemiskinan dipandang sebagai keadaan yang terjadi karena ketidakmampuan masyarakat dalam sisi ekonominya, hal ini misalnya dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan.

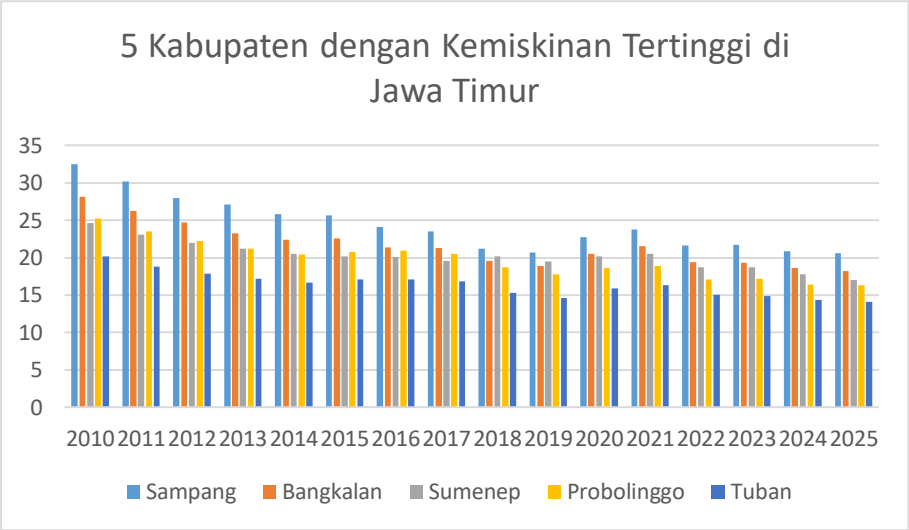
Tingkat kemiskinan didefinisikan sebagai jumlah orang yang tidak mampu memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar (M. Todaro

& Smith, 2012). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensional, sehingga tidak mudah untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia.

Kemiskinan merupakan persalahan multidimensional yang mencakup aspek sosial dan ekonomi, serta menjadi prioritas penanganan di Indonesia. Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program pembangunan dan bantuan sosial, tingkat kemiskinan di sejumlah daerah masih relatif tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencerminkan adanya tren penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, namun disparitas di beberapa daerah tertentu masih substansial. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh distribusi pendapatan, keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, serta minimnya peluang kerja, yang secara simultan menghambat percepatan pengentasan kemiskinan khususnya di Kabupaten Tuban.

Dalam 15 tahun terakhir, Kabupaten Tuban seakan tak pernah lepas dari jeratan kemiskinan. Meski tren angka terus menurun, posisinya di Jawa Timur tetap stagnan di papan atas. Menurut Data Pusat Statistik (BPS) pada 2025, menyebutkan bahwa Tuban masih menempati peringkat kelima kabupaten termiskin di Jawa Timur dengan presentase penduduk miskin 14,13%. Dalam daftar itu, posisi pertama ditempati Kabupaten Sampang, disusul Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, lalu Tuban.

Tabel 1. 1 Lima Kabupaten dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi di Jawa Timur

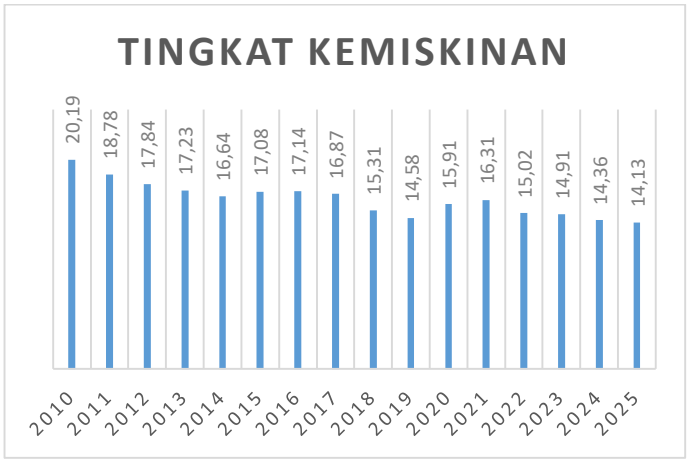


(Sumber : Badan Pusat Statistik)

Berdasarkan data diatas lima kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur, terlihat pola yang mengindikasikan bahwa wilayah-wilayah tersebut memiliki karakteristik dan struktur ekonomi serupa.

Kabupaten Tuban merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki karakteristik ekonomi unik, yakni transisi dari sektor agraris ke industri skala besar, namun tetap memiliki tantangan angka kemiskinan yang berada diatas rata-rata provinsi. Tren selama 15 tahun tersebut menunjukkan adanya penurunan persentase penduduk miskin secara bertahap di Kabupaten Tuban. Namun, laju penurunan tersebut dinilai lambat dibanding pesatnya pertumbuhan sektor industri yang masuk ke daerah ini. Hal ini menegaskan bahwa fenomena kemiskinan di wilayah ini bukan sekedar dampak fluktuasi ekonomi jangka pendek, melainkan masalah struktural yang belum terselesaikan secara tuntas.

Tabel 1. 2 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tuban Tahun 2010-2025



(Sumber : Badan Pusat Statistik Tuban)

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban sepanjang periode 2010-2025 menunjukkan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun dalam jangka panjang. Pada rentang tahun 2010 – 2019, persentase penduduk miskin mengalami penurunan bertahap akibat program pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, tren positif tersebut sempat terhentik oleh lonjakan angka kemiskinan pada rentang 2020 – 2021 yang dipicu oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan dan daya beli masyarakat. Sejak tahun 2022 hingga 2025, angka kemiskinan berhasil ditekan kembali seiring dengan pemulihan ekonomi lokal serta penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor hingga mencapai titik terendah yakni 14,13%. Meskipun mengalami perbaikan, tingkat kemiskinan masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi.

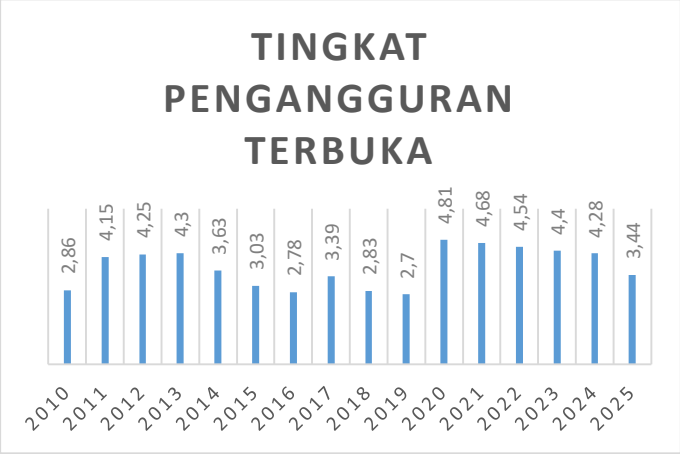
Menurut Prayoga kemiskinan timbul akibat berbagai faktor, seperti jumlah pengangguran yang semakin tahun semakin bertambah tanpa diikuti dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, upah kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup, dan kaulitas hidup masyarakat yang rendah (Prayoga et al., 2021).

Menurut Abada dalam (Munawaroh et al., 2025) sebagian besar negara berkembang menghadapi pengangguran sebagai masalah sosial ekonomi yang mengkhawatirkan. Pengangguran merupakan masalah ekonomi yang sering dihadapi setiap daerah di Indonesia, walaupun perkembangan ekonomi daerah mengalami kemajuan, tetapi tingkat pengangguran masih menjadi persoalan di kehidupan masyarakat (Rahman et al., 2025).

Menurut Badan Pusat Statistik dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Semakin tinggi tingkat pengangguran suatu daerah maka berdampak terhadap kemiskinan di daerah tersebut. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) dapat terwujud.

Menurut Sukirno dalam (Simbala, 2024) pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja, ingin mendapatkan pekerjaan akan tetapi belum memperolehnya. Alasan pengangguran selalu muncul dalam perekonomian yaitu adanya proses pencarian kerja, yaitu dibutuhkan waktu untuk para pekerja dan pekerjaan dalam kekakuan upah yang diperoleh. Masyarakat yang berada di dalam kondisi pengangguran maka masyarakat tersebut akan mengalami kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga akan menyebabkan kemiskinan kehidupan masyarakat akan meningkat.

Tabel 1. 3 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tuban Tahun 2010-2025



(Sumber : Badan Pusat Statistik Tuban)

Dari data diatas, perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tuban sepanjang periode 2010 – 2025 menunjukkan tren fluktuatif yang dipengaruhi oleh pergeseran struktur ekonomi daerah. Pada kurun waktu 2010 – 2019, TPT di Kabupaten Tuban relatif stabil dengan rata-rata berada pada kisaran 3,5% hingga 4%. Kondisi ini mencerminkan karakteristik wilayah Tuban yang pada saat itu masih didominasi oleh sektor pertanian, yang secara historis memiliki kapasitas tinggi dalam menyerap tenaga kerja informal meski dengan tingkat produktivitas relatif terbatas.

Puncak lonjakan pengangguran terjadi pada periode 2020 – 2021 akibat disrupsi pandemi COVID-19, di mana TPT Kabupaten Tuban mengalami kenaikan signifikan hingga hampir menembus 5%. Pandemi menekan sektor manufaktur dan jasa yang sedang berkembang di Tuban, sehingga memicu gelombang pemutusan hubungan kerja serta penurunan penyerapan tenaga kerja baru. Namun, memasuki

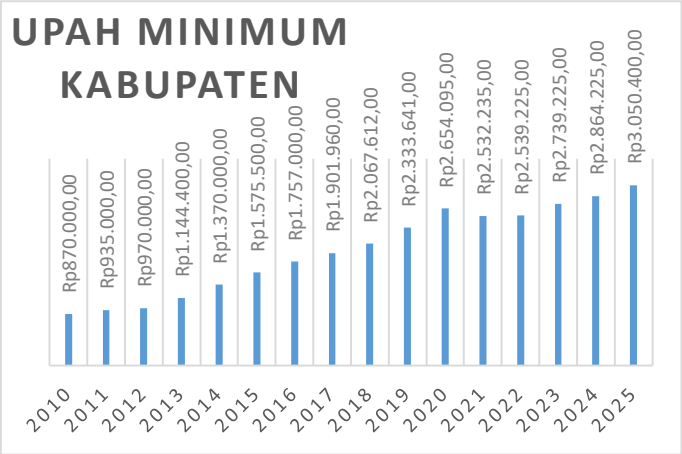
fase pemulihan pasca pandemi (2022 – 2025), TPT menunjukkan tren penurunan secara bertahap menuju 3,44% pada tahun 2024.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah Upah Minimum. Upah minimum sering dianggap sebagai salah satu instrumen kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mengurangi kemiskinan. Menurut Kaufman dalam (Prayoga et al., 2021) menyatakan bahwa pada saat upah minimum di suatu daerah tinggi maka kesejahteraan juga akan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Sehingga masyarakat akan terbebas dari kemiskinan.

Menurut Peraturan Kementrian Ketenagakerjaan No.12 Tahun 2016, upah minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang telah ditetapkan gubernur sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) guna memastikan daya beli buruh dan pekerja tetap terjaga di atas garis kemiskinan. Kenaikan UMK secara bertahap ini diharapkan mampu mendorong tingkat konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen utama dalam penekanan angka kemiskinan daerah.

Berdasarkan tabel di bawah ini dalam kurun waktu 2010 hingga 2020, penetapan Upah Minimum Kabupaten Tuban mengalami laju pertumbuhan yang relatif tinggi seiring dengan dimulainya masa transisi struktur ekonomi menuju kawasan industri. Masuknya investasi di Tuban mendorong penyesuaian standar upah agar relevan dengan biaya hidup serta produktivitas tenaga kerja sektor industri.

Tabel 1. 4 Upah Minimum Kabupaten di Kabupaten Tuban Tahun 2010-2025



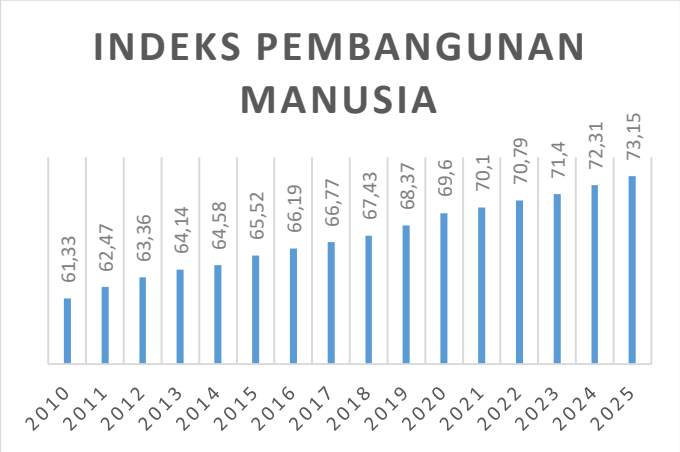
(Sumber : Badan Pusat Statistik Tuban)

Memasuki periode 2021 hingga 2025, laju kenaikan UMK cenderung lebih moderat akibat penyesuaian pengupahan yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara lebih terukur. Tren pengupahan yang stabil ini berpotensi memberikan dampak ganda, yaitu menjaga daya beli pekerja berpenghasilan rendah sekaligus mempertahankan iklim investasi daerah. Dengan demikian, efektivitas UMK sebagai instrumen penurun kemiskinan sangat bergantung pada sejauh mana tingkat upah tersebut mampu menutupi kebutuhan hidup minimum keluarga pekerja.

Menurut BPS dalam (Safrinja et al., 2025) IPM yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, merefleksikan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Ketika IPM meningkat, indikator-indikator seperti angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan per kapita juga mengalami perbaikan. Hal ini tentu saja berdampak secara langsung pada pengurang kemiskinan, karena masyarakat yang sehat, terdidik, dan memiliki akses

terhadap sumber daya ekonomi mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Sebaliknya, rendahnya IPM sering kali berkontribusi pada peningkatan kemiskinan, karena keterbatasan akses terhadap layanan dasar menghambat mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Tabel 1. 5 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tuban Tahun 2010-2025



(Sumber : Badan Pusat Statistik Tuban)

Berdasarkan data pada tabel di atas, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tuban menunjukkan tren peningkatan yang positif secara berkesinambungan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir (2010 – 2025). Pada tahun 2010, IPM Kabupaten Tuban berada pada kisaran 61,33 terus merambat naik hingga menembus angka di atas 70 pada rentang tahun 2021 – 2025, yang mengindikasikan transisi status pembangunan manusia dari kategori “sedang” menuju kategori “tinggi”. Kenaikan ini didorong oleh perbaikan secara bertahap pada ketiga dimensi penyusunnya, yaitu umur panjang, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta standar hidup layak.

Dalam (Resmana & Gunawan, 2025) mengatakan bahwa Badan Pusat Statistik membagi IPM ke dalam empat kategori, yaitu 1) <60 rendah, 2) 60-69 sedang, 3) 70-79 tinggi, 4) >80 sangat tinggi. Berdasarkan data diatas Kabupaten Tuban dapat dikategorikan sebagai kabupaten dengan IPM tinggi. Hal ini mencerminkan ketahanan sosial masyarakat Tuban serta efektivitas berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga pendidikan.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan menunjukkan adanya *gap empiris* yang memerlukan kajian lebih lanjut. Berdasarkan studi oleh Sholikah di Kabupaten Tuban periode 2005-2019 menemukan bahwa pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Sholikah et al., 2021). Namun, hasil ini kontradiktif dengan studi oleh Sari di Provinsi Lampung yang justru menyatakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin (N. Sari et al., 2024).

Selain itu, terdapat perbedaan temuan pada variabel yang mempresentasikan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tuban, pendidikan ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan karena rendahnya ketrampilan daya saing dan tingkat lama sekolah yang masih minim. Sebaliknya, studi di Lampung menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif dan signifikan, yang berarti peningkatan kualitas manusia justru menjadi faktor utama dalam pengentasan kemiskinan.

Research Gap ini dipertegas dengan belum adanya integrasi variabel Upah Minimum Kabupaten (UMK) dalam studi terdahulu di Kabupaten Tuban, padahal UMK di wilayah lain seperti Lampung terbukti memiliki korelasi signifikan dalam memengaruhi daya beli masyarakat miskin. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **"Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Kabupaten, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Tuban"** dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggabungkan variabel TPT, UMK, dan IPM dalam satu model analisis guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kemiskinan di Kabupaten Tuban.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban?
2. Apakah Upah Minimum Kabupaten berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban?
3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh dari Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban
2. Untuk menganalisis pengaruh dari Upah Minimum Kabupaten terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban

3. Untuk menganalisis pengaruh dari Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus pada pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Kabupaten, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tuban dengan menggunakan data *time series* selama periode 2010 – 2025. Mengacu pada keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka fokus utama penelitian ini adalah variabel terikat yaitu Tingkat Kemiskinan, sedangkan variabel bebas yang dianalisis meliputi Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Kabupaten, Dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tuban.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dalam bidang ekonomi pembangunan, khususnya terkait pengaruh tingkat pengangguran terbuka, upah minimum kabupaten, dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di tingkat kabupaten.
2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, penelitian dibuat sebagai bentuk kontribusi mahasiswa dalam menjawab permasalahan sosial-ekonomi secara nyata di masyarakat
3. Bagi Pemerintah Kabupaten Tuban, sebagai bahan pertimbangan merumuskan kebijakan dalam pengentasan masalah kemiskinan yang tepat sasaran.